

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	22
BAB II KEABSAHAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI	
HUKUM DAN HAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	2
Tabel 2. Perbedaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019	36
Tabel 3. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan	42
Tabel 4. Negara-Negara yang Berhasil Melaksanakan Program Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017.....	26
Bagan 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.....	27

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

DAFTAR PUTUSAN

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2011